
**THE EFFECT OF THE LOCALLY - GENERATED
REVENUE AND THE GENERAL ALLOCATION
FUND ON THE CAPITAL EXPENDITURE**
(Survey On the Provincial /District / City Region Banten and DKI Jakarta)

Hari Setiyawati

hari_setiyawati@mercubuana.ac.id

Mercu Buana University

ABSTRACT

The purpose of this study was to see whether there is an influence of The Locally-Generated Revenue and The General Allocation Fund on the Capital Expenditure . The Locally-Generated Revenue is measured from the taxes, levies, wealth management outcomes separated areas and other legitimate Locally-Generated Revenue. The General Allocation Fund is measured from domestic revenue, the fiscal gap and basic allocation. The Capital Expenditure is property, plant and equipment expenditures. This study is a survey research in provincial government / district / city of Banten and Jakarta. The sample in this study were all local governments in the two provinces, amounting to ten local governments, so this study is a census research, in the sense that the entire population sampled. Data analysis method used is the multiple regression. From the results of data analysis and discussion, it can be concluded that The Locally-Generated Revenue affect on the Capital Expenditure. The General Allocation Fund affect on the Capital Expenditure.

Keywords: *The Locally - Generated Revenue, The General Allocation Fund, The Capital Expenditure*

PENDAHULUAN

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah

pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah didaerah dalam memanfaatkan PAD.

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Pungky, 2011). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin yang relatif kurang produktif dan adanya keterbatasan sumber daya alam dalam alokasi belanja modal. Seharusnya pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktifitas pembangun dan untuk program- program layanan publik.

Menurut Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) meneliti tentang “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum / anggaran umum (DAU) dari belanja modal (belanja modal) dengan mempertimbangkan data yang dikumpulkan. Objek penelitian adalah Kabupaten / Kota di Pulau Jawa. Hasil penelitian ini menemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal (belanja modal). Ini berarti pemerintah daerah mampu memprediksi belanja modal berdasarkan PAD dan DAU. Analisis selanjutnya menunjukkan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada belanja modal (belanja modal).

Berdasarkan dari fenomena yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Terhadap Belanja Modal? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. Adapun kegunaan dari penelitian ini

adalah memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat mendukung atau melengkapai teori yang telah ada berkaitan dengan ilmu akuntansi dan khususnya akuntansi sektor publik . Serta bagi praktisi di bidang akuntansi pemerintahan sebagai sumbangan pemikiran dan acuan pemecahan masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan akuntansi pada pemerintah daerah.

KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Abdul dan Muhammad (2012 : 101) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, terdiri dari : 1) Pajak Daerah (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di atas air, Pajak air di bawah tanah, Pajak Air permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, pajak Parkir); 2) Retribusi Daerah ; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan (Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN/BUMD/perusahaan milik swasta atau kelompok usaha); 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (21) Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Mulai tahun 2008 jumlah DAU sekurang-kurangnya 26% (dua

puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Pendapatan Dalam Negeri Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagi hasilkan kepada daerah (Nurlan, 2006 : 96).

Menurut (Nurlan 2006 : 96) Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota.

Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, antara lain penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.

Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Aset tetap mempunyai ciri – ciri berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Dan nilainya relatif material, sedangkan ciri – ciri aset lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan

nilainya relatif material. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Penelitian Terdahulu

Menurut Mutiara Maimunah (2006) meneliti tentang “Flypaper Effect” Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera”. Pada penelitiannya terjadinya flypaper effect di DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah kabupaten / kota di Sumatera. Tujuan lainnya adalah untuk menguji adanya flypaper effect yang berbeda antara wilayah rendah PAD dan daerah tinggi PAD. Kemudian, memeriksa apakah flypaper masih terjadi pengeluaran daerah dalam pendidikan, kesehatan dan lapangan infrastruktur. Data berasal dari APBD dan laporan pendapatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara terpisah mempengaruhi pengeluaran lokal.

Menurut Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) meneliti tentang “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum / anggaran umum (DAU) dari belanja modal (belanja modal) dengan mempertimbangkan data yang dikumpulkan. Objek penelitian adalah Kabupaten / Kota di Pulau Jawa. Hasil penelitian ini menemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal (belanja modal). Ini berarti pemerintah daerah mampu memprediksi belanja modal berdasarkan PAD dan DAU. Analisis selanjutnya menunjukkan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada belanja modal (belanja modal).

Menurut David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) meneliti tentang “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Per Kapita”. Penelitian ini adalah menemukan hubungan Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Sendiri, dan Pendapatan Per kapita di kabupaten / kota di Jawa dan Bali. Penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling Test untuk melihat hubungan antara

variabel. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum yang positif berkaitan dengan Belanja Modal, Belanja Modal berhubungan positif dengan Pendapatan Sendiri (PAD), Belanja Modal berhubungan negatif dengan Pendapatan Per Kapita, dan Pemerintah Daerah Penerimaan Asli berhubungan positif terhadap Pendapatan Per kapita.

Menurut Diah Sulistyowati (2011) meneliti tentang “Pengaruh Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal” Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Restribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal.

Menurut Arbie Gugus Wandira (2013) meneliti tentang “Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal” pada pemerintah provinsi se Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

RERANGKA PEMIKIRAN

Menurut Mardiasmo (2009) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah asli yang sah. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, pelaratan dan aset tak berwujud.

Darwanti (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan

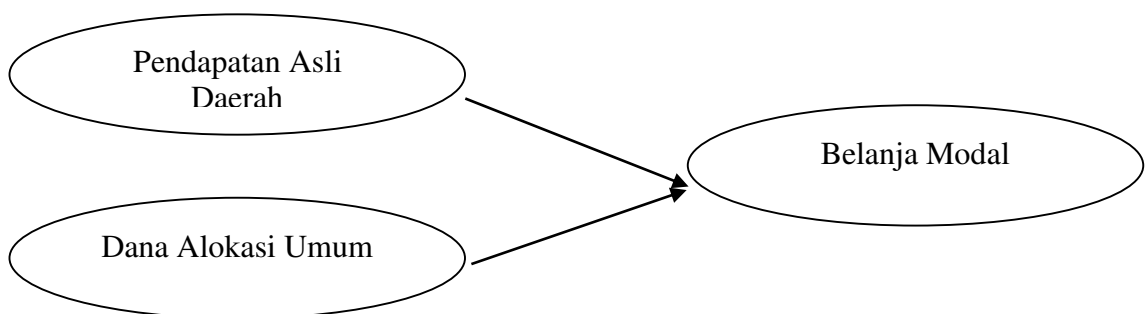
kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan.

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonstrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33/2004).

Prakoso (2004 dikutip dari Siswantoro 2012) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari pemerintah empiris tersebut. Hasil penelitian Harianto dan Adi (2007) semakin memperkuat bukti empiris tersebut. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat, Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi semakin tinggi.

Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU).

Keterkaitan antara pendapatan asli daerah , dana alokasi umum dan dan belanja modal dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat eksploratif (*exploratory study*) dengan jenis investigasi studi kausal (*causal study*) dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah (Uma Sekaran, 2007). Dalam penelitian ini akan diuji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di wilayah Banten dan DKI Jakarta yang berjumlah 10 pemda. Teknik samplingnya menggunakan sampel jenuh, oleh karena itu seluruh populasi dijadikan sampel. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Metode analisis data diawali dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis yang terdiri dari koefisien determinasi, uji statistik F, uji signifikansi individual dan analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan yang dilakukan mengacu pada hipotesis yang telah dinyatakan diatas. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan parameter estimates, variabel X1 yaitu Pendapatan Asli Daerah mempunyai tingkat signifikansi 0.000 atau dibawah 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Darwanto (2012) , juga penelitian Tria Novianti (2015) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Abdul dan Muhammad (2012:101) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh pemerintah

daerah dari pemerintah pusat, maka akan semakin tinggi pula alokasi belanja modalnya. Oleh karena itu untuk meningkatkan belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Banten dan DKI Jakarta, hendaknya pemerintah daerah mengelola dan memanfaatkan kekayaan asli daerah dengan lebih intensif. Selain itu juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah pada setiap kabupaten/kota di Provinsi tersebut. Dengan demikian pendapatan asli daerah akan meningkat dan belanja modal pun akan meningkat. Sehingga kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah pada kabupaten/kota akan semakin baik.

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan parameter estimates untuk variabel X2 yaitu Dana Alokasi Umum mempunyai tingkat signifikansi 0.000 atau dibawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Darwanto dan Yulia (2007) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin tinggi dana alokasi umum yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat, maka akan semakin tinggi pula alokasi belanja daerahnya. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Jika hal ini masih terus berlangsung maka otonomi daerah kemungkinan besar akan terhambat. Dalam hal ini pemerintah daerah harus terus menggali strategi guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil daerah sehingga pemerintah daerah tidak lagi hanya mengandalkan dana alokasi umum dari pemerintah pusat saja.

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan parameter estimates untuk variabel X3 yaitu Pendapatan Asli Daerah mempunyai tingkat signifikansi 0.000 atau dibawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Darwanto dan Yulia (2007) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap variable Belanja Modal. Menurut Nurlan (2006:84) Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula

yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal dan potensi daerah. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin tinggi dana alokasi umum yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat, maka akan semakin tinggi pula alokasi belanja modalnya.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Jika hal ini masih terus berlangsung maka otonomi daerah kemungkinan besar akan terhambat. Dalam hal ini pemerintah daerah harus terus menggali strategi guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil daerah sehingga pemerintah daerah tidak lagi hanya mengandalkan dana alokasi umum dari pemerintah pusat saja.

Tabel 1
Daftar Anggota Sampel

No.	Wilayah
1.	Propinsi DKI
2.	Propinsi Banten
3.	Kabupaten Lebak
4.	Kabupaten Pandeglang
5.	Kabupaten Serang
6.	Kabupaten Tangerang
7.	Kota Cilegon
8.	Kota Serang
9.	Kota Tangerang
10.	Kota Tangerang Selatan

Sumber : IHPS I 2015

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Pengukuran	Skala
PAD (X1)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Abdul dan Muhammad, 2012 : 101)	- Pajak - Retribusi - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - Lain-lain PAD yang sah	PAD = Pajak + Retribusi + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah	Rasio

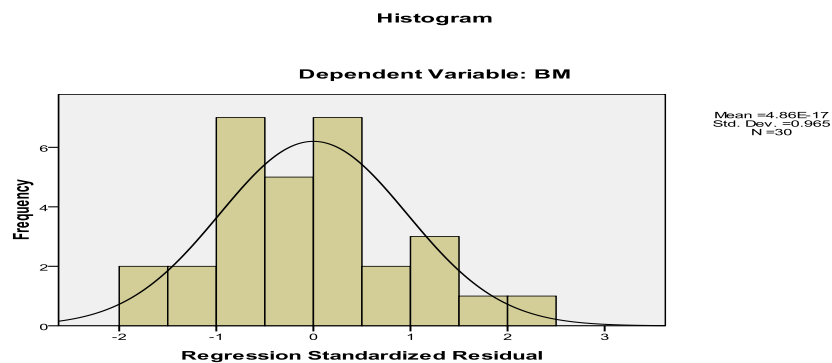
DAU (X2)	Berdasarkan Pasal 1 Ayat (21) UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.	- Pendapatan Dalam Negeri - Celah fiskal - Alokasi Dasar	DAU = 26% x PDN DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar	Rasio
BM (Y)	Belanja Modal (BM) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi	-Belanja Modal Tanah - Belanja Modal \ Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan -. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	BM = Belanja Operasi + Belanja Modal + Belanja tidak terduga	Rasio

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	30	41890.0	4118551.0	765217.867	1.0295E6
DAU	30	281851.0	1887770.0	725884.800	355122.4807
BM	30	140960.0	1316781.0	475469.200	346241.4929

Valid N (listwise) 30

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (dalam jutaan Rupiah)



Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Gambar 2 : Grafik Uji Normalitas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolonieritas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	VIF
1	(Constant)	-100899.739	69104.267		-1.460	.156
	PAD	.194	.029	.577	6.622	.000 5.931
	DAU	.589	.085	.604	6.933	.000 1.255

a. Dependent Variable: BM

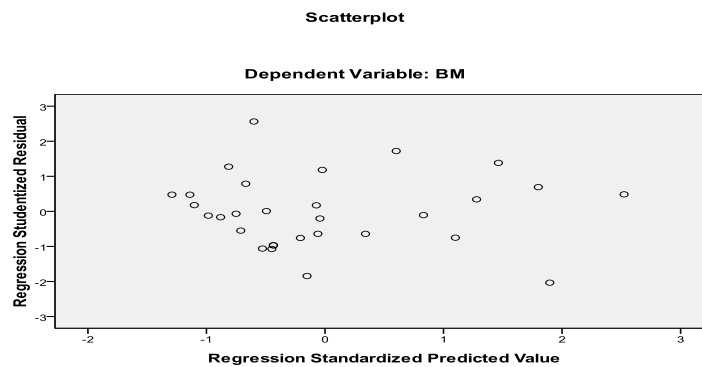
Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.894 ^a	.799	.784	160873.5714	2.012

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS



Gambar 3 : Grafik Scatterplot

Tabel 6
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2.778E12	2	1.389E12	53.667	.000 ^a
Residual	6.988E11	27	2.588E10		
Total	3.477E12	29			

- a. Predictors: (Constant), DAU, PAD
 b. Dependent Variable: BM
 Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Tabel 7
Hasil Uji Statistik t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	-100899.739	69104.267		-1.460	.156
PAD	.194	.029	.577	6.622	.000
DAU	.589	.085	.604	6.933	.000

- a. Dependent Variable: BM
 Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisa hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti peningkatan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti peningkatan dan penurunan Dana Alokasi Umum mempengaruhi Belanja Modal .

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, untuk meningkatkan alokasi daerah khususnya belanja modal. Hendaknya pemerintah daerah dapat terus mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya yang dimiliki, untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dari pemerintah pusat,

sehingga daerah akan lebih siap menaksir jumlah pengeluaran dan jumlah belanja dengan lebih efektif dan efisien.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas sampel selain kabupaten/kota yang ada di provinsi Banten dan DKI Jakarta sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih komprehensif dari penelitian yang dilakukan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel – variabel lain untuk menambah referensi dari penelitian yang belum pernah dilakukan.

REFERENSI

- Andayani, Wuryan. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Arbie Gugus Wandira.2013.”Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal”. *Accounting Analysis Journal*. AAJ (2) (1)
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. (2007). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. *Simposium Nasional Akuntansi 10 Makassar*.
- David Harianto dan Priyo Hari Adi. (2007).”Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan PerKapita”. *Simposium Nasional Akuntansi 10 Makassar*.
- Darise, Nurlan. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*, PT Indeks, Jakarta.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia.(2007) “Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal”. Makalah disajikan pada *Seminar Antarbangsa di Universitas Hassanudin, Makassar, 26-28 Juli 2007*.
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Indra Bastian.(2011).*Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*.Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.Yogyakarta.
- Indra Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga, Jakarta. Darise. Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT Indeks, Jakarta.
- Kusnandar dan Dodik Siswanto.(2012).”Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal”.*Jurnal Universitas Indonesia*

-
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Prakosa, Kesit Bambang. (2004). “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah” (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY), *JAAI* Volume 8 No 2, ISSN : 1410 – 2420.
- Renyowijoyo, Muindro.(2013). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, Mitra Wacana Media, Jakarta.